



Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Yakomina Flora Hosio

Universitas Ottow Geissler Papua

yhosioflora@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

05 Agustus 2022

Disetujui :

10 Agustus 2022

Dipublikasikan :

19 Agustus 2022

ABSTRAK

Pencapaian kinerja dalam penataan kembali AKIP merupakan ukuran kinerja perangkat organisasi program dan kegiatan dalam membuat pemerintah daerah mencapai target dan sasaran yang dapat dicapai dari visi misi. Pengukuran kinerja dalam model logika dan pendekatan OPM dan cetak biru M / kinerja. Penelitian ini mencoba menguji kinerja pemerintah kota Jayapura dengan mengukur kualitas indikator kinerja dan logika sasaran dalam dokumen rencana pelaporan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam penyusunan laporan kinerja. Hasil penelitian dan indikasi bahwa indikator kinerja pemerintah kota Jayapura dan tidak menunjukkan logika antar indikator kinerja dalam dokumen rencana pelaporan. Kinerja yang menonjol pada indikator yang dilaporkan di LAKIP pemerintah kota Jayapura dengan hasil analisis pada tahun 2017 menjadi indikator aktivitas masyarakat berdasarkan 41% dan hasil pengabdian masyarakat 59%.

Kata Kunci: Tata Kelola, Model Logis, Pendekatan OPM & Reformasi Kinerja

ABSTRACT

Achieving performance in reorganizing AKIP is a measure of the performance of tools for program organizations and activities in making local governments achieve targets and targets that can be achieved from vision to mission. Performance measurement in logic models and OPM approaches and M / performance blueprint. This research looks to try the performance of the Jayapura city government by measuring the quality of performance indicators and target logic in the plan document to report and analyze the inhibiting and supporting factors in preparing the performance report. The results of the study and indications that the Jayapura city government performance indicators and do not show logic between the performance indicators in the reporting plan document. Prominent performance on the indicators reported in LAKIP Jayapura city government with the results of the analysis in 2017 has become an indicator of community activity based on 41% and the results of community services 59%.

Keywords: Good Governance, Logic Model, OPM & M Approach, Performance Refort



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami perkembangan reformasi keuangan negara sejak orde baru seperti tertuang pada Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pedoman wajib bendahara. Perkembangan selanjutnya terjadi saat dan setelah krisis global pada 1998. Dampak reformasi negara pada 1998 adalah desentralisasi dan otonomi daerah seperti tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang sekarang menjadi UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 1999 yang sekarang menjadi UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 105 dan 106 Tahun 2000 serta Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Reformasi keuangan negara yang juga berlaku di Provinsi Papua dalam melaksanakan UU No. 22 Tahun 1999, tetapi disebabkan adanya isu untuk merdeka ditandatangani UU No. 21 Tahun 2001 sebagai solusi penyelesaian konflik itu. Dalam pada itu, tujuan utama otonomi khusus Papua adalah pemerataan pembangunan, peningkatan harkat dan martabat masyarakat Papua, dan penyelesaian persoalan pelanggaran HAM. Adapun landasan trisula UU tentang reformasi keuangan daerah ada pada UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, adanya PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 berdasarkan Pemendagri No. 64 Tahun 2013.

Selanjutnya, reformasi keuangan negara yang berjalan pada saat ini adalah perubahan sistem akuntansi berbasis akrual. Reformasi ini dilakukan demi peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (GG) dengan konsep manajemen publik yang baru (NPM). Dasar GG tertuang dalam UUD 1945, TAP MPR RI No. XI Tahun 1998 dan UU No 28 Tahun

1999 dengan 7 asasnya. Untuk mewujudkan GG Presiden BJ Habibie menandatangani Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 melalui keputusan kepala LAN Tahun 1999 dan sekarang diperbaharui dengan keputusan kepala LAN Tahun 2003 dan perubahan terakhirnya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sementara itu, yang menjadi tantangan pada saat ini bagi seluruh Indonesia khususnya dari Rekapitulasi Nilai AKIP Kabupaten/ Kota Se Provinsi Papua yang dilakukan tiap tahun dengan tujuan untuk mengawasi dan mengawal kinerja pembangunan daerah sesuai semangat reformasi birokrasi yang bagaimana laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/LAKIP dapat disusun dengan baik, benar, dan tepat waktu berdasarkan 5 komponen SAKIP adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan capaian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan rekapitulasi LAKIP pada Provinsi Papua terdapat 1 Kota dan 28 Kabupaten terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Hasil Evaluasi AKIP Kota/Kabupaten Se Provinsi Papua Tahun 2017

Kriteria	Predikat	Kota	Kabupaten
AA	Memuaskan	-	-
A	Sangat Baik	-	-
B	Baik	-	-
CC	Cukup Baik	1	1
C	Agak Kurang	-	13
D	Kurang	-	-
Total		1	14

Sumber: Hasil Evaluasi dan Rekapitulasi Kemeneg PAN & RB Tahun 2017

Dalam tabel diatas pelaporan AKIP Kota Jayapura mendapat predikat “CC” sesuai evaluasi kemeneg PAN dan RB dengan alasan indikator kinerja utamanya perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar dan dapat sedikit menggambarkan keselarasan dokumen perencanaan sampai ke dokumen pelaporannya yang berdasarkan atas teori kelembagaan koersif yang artinya penyusunan LAKIP masih sebatas mengikuti aturan atau ketentuan (Akbar et.al 2012) dan juga adanya peningkatan nilai AKIP dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hosio (2015) dimana Kota Jayapura sebagai salah satu Ibu Kota Provinsi Papua berdasarkan hasil Penilaian kemenag PAN dan RB tahun 2012 yaitu nilai AKIP dengan predikat “D” yang tidak dapat menggambarkan keselarasan dokumen perencanaan sampai ke dokumen pelaporannya. Dan dari hasil Rekapitulasi masih terdapat 14 Kabupaten Se Provinsi Papua yang belum dapat dievaluasi (Tidak Evaluasi), hal ini terjadi karena belum adanya perhatian, pemahaman, dan komitmen dari Pimpinan Daerah tentang pentingnya SAKIP sebagai alat ukur dalam Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih dan Bertanggung jawab guna Peningkatan Kualitas Pelayanan baik Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah maupun peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan analisis mendalam terhadap konteks dan situasi yang mirip dalam organisasi lain, yang sifat dan jenis masalah yang terjadi serupa dengan yang dialami pada situasi saat ini. Studi kasus memiliki sifat kualitatif yang berguna untuk menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman di masa lalu dalam pemecahan masalah (Sekaran, 2007).

Prosedur dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan yang dijabarkan sebagai berikut: Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan pengumpulan data dari membaca hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Penelitian kepustakaan pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan regulasi-regulasi yang terkait dengan akuntabilitas pemerintah, dokumen perencanaan, dan pelaporan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung Pemerintah Kota Jayapura dan organisasi perangkat daerah/OPD terkait di Pemerintah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut data primer dengan cara dokumentasi dilakukan untuk mempelajari data dan informasi yang relevan terhadap penelitian dan bersumber dari objek penelitian yaitu: dokumen

perencanaan RPJMD/Renstra OPD tahun 2012-2016 dan dokumen pelaporan AKIP/LAKIP Pemerintah Kota Jayapura beserta Dinas Kesehatan, dan Inspektorat Kota Jayapura Tahun 2017.

Teknik analisis data di antaranya pencermatan atas model penelitian, uji keabsahan data, yaitu uji validitas internal, uji validitas eksternal, uji reabilitas dan uji objektivitas. Alat analisisnya ialah model logika dan cetak biru kinerja terhadap data primer dan data sekunder dengan empat langkah yaitu, (1) analisis model logika perencanaan. (2) analisis indikator kinerja. (3) pembuatan peta indikator kinerja, dan (4) pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan Pemerintah Kota Jayapura dengan menggunakan pendekatan model logika menyatakan bahwa terdapat (1) ketidaksesuaian sasaran pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja pemerintah Kota Jayapura, (2) kesesuaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan, dan (3) ketidaksesuaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan

Analisis Model Logika Dokumen Perencanaan sampai Dokumen Pelaporan

Analisis keselarasan informasi dengan model logika dari dokumen perencanaan hingga dokumen pelaporan yang mengalami masalah di antaranya ialah pengurangan dan penambahan sasaran maupun indikator yang dijabarkan dalam tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 2 Analisis Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tahun 2017

Kelompok Masalah	Permasalahan	Dokumen Penelitian
Ketidaksesuaian sasaran strategis pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Pengurangan sasaran kinerja	RPJMD, RENSTRA, dan LAKIP
Ketidaksesuaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan pelaporan	Indikator kinerja perencanaan tidak dievaluasi pada LAKIP	RPJMD, RENSTRA, dan LAKIP
	Pengukuran indikator kinerja yang tidak direncanakan pada RPJMD/RENSTRA tetapi muncul di LAKIP	RPJMD, RENSTRA, dan LAKIP

Sumber: Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kota Jayapura

Analisis Cetak Biru Kinerja dengan Analisis Empat Kuadran

Analisis cetak biru kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis indikator kinerja yang dijadikan aspek utama penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jayapura yang kemudian dipetakan ke dalam empat kuadran. Selanjutnya dikelompokkan indikator kinerja pada lampiran dokumen LAKIP 2017 Pemerintah Kota Jayapura ke dalam empat kolom yang terdapat pada tabel 5.1 berdasarkan upaya, efek, kuantitas, dan kualitas.

Indikator kinerja dapat dikaitkan dengan indikator hasil untuk mengukur upaya yang dilakukan dan efek yang akan diperoleh. Selanjutnya bentuk upaya dan efek dapat dibedakan atas apakah ukuran atau tergetnya dalam bentuk kuantitas atau kualitas. Hasilnya dapat disesuaikan dengan indikator efek dengan pertimbangan apakah manfaat kegiatan itu berupa pelayanan (*service delivery outcome*) atau manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat (*community outcome*). Pertanyaan untuk mengidentifikasi keluaran tersebut dapat dibagi kedalam empat kuadran Friedman, yaitu:

1. Kuantitas upaya: seberapa banyak pelayanan yang diberikan?
2. Kualitas upaya: seberapa baik pelayanan yang diberikan?
3. Kuantitas efek: berapa jumlah pelanggan yang berperilaku menjadi lebih baik?
4. Kualitas efek: berapa jumlah presentasi pelanggan yang berperilaku menjadi baik dan bagaimana cara mereka menjadi baik?

Dalam pemetaan analisis empat kuadran termuat seluruh indikator kinerja pada LAKIP yang memiliki kesesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan OPD dan Pemerintah Kota Jayapura 2017 sebanyak 59 indikator kinerja.

Tabel 3 Identifikasi Aspek Keluaran Tahun 2017

Tahun	Upaya		Efek	
	Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas
2017	5	19	17	18
Jumlah	5	19	17	18

Sumber: Indikator Kinerja Utama

Tabel 3 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja LAKIP Berdasarkan Cetak Biru Kinerja dengan Analisis Empat Kuadran

Keterangan	Tahun 2017
Kuantitas Upaya	8 %
Kuantitas Efek	29 %
Kualitas Upaya	32 %
Kualitas Efek	31 %
Pelayanan Kegiatan	41 %
Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat	59 %

Sumber: Indikator Kinerja Utama

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian indikator kinerja belum selaras antara dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja 2017, baik pada Pemerintah Kota, Dinas Kesehatan, maupun Inspektorat. Berdasarkan hasil analisis bagaimana perencanaan dan pengukuran indikator kinerja dalam LAKIP dapat dirincikan hal-hal berikut.

1. Pedoman atau petunjuk teknis yang menjelaskan tentang penyusunan dan pelaporan LAKIP ialah Permeneg PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman atau format penyusunan LAKIP dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP .
2. Aspek utama dalam penyusunan LAKIP ialah dokumen RPJMD dan Informasi Kinerja yang tidak menunjukkan kerelaranan sasaran kinerja dan indicator lalu program serta kegiatan.
3. Perencanaan dan pengukuran indikator kinerja dalam LAKIP, RPJMD, dan RENSTRA didasarkan atas realisasi capaian kinerja OPD.
4. Kendala dalam pengukuran dan evaluasi atas capaian indikator kinerja LAKIP Kota Jayapura adalah data capaian tiap-tiap bidang di OPD dan kurangnya tim penyusun LAKIP, dan kurang kooperatifnya penyampaian laporan yang akurat.

KESIMPULAN

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini ialah

1. Analisis dan evaluasi penyusunan laporan kinerja yang ada pada tulisan ini berpedoman kepada aturan Permeneg PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, namun hasilnya menunjukkan bahwa dokumen perencanaan dan pelaporannya belum menunjukkan model logika atau hubungan yang logis sebagai berikut
 - (a) keterbatasan SDM dalam penyusunan LAKIP.
 - (b) Penyusunan LAKIP belum sepenuhnya mengacu aturan atau pedoman penyusunan.
 - (c) Tidak efektifnya Tim Penyusun LAKIP atau Laporan Kinerja Kota Jayapura dalam mendapatkan data realisasi/faktual dari Bidang-bidang di OPD.
 - (d) Indikator yang ada pada dokumen perencanaan belum mengandung indikator kinerja utama.
 - (e) Tidak dapat menjabarkan sasaran dan indicator serta program atau kegiatan pada dokumen perencanaan 5 tahun maupun 1 tahun sampai pelaporan LAKIP dan menentukan indicator yang di bedakan antara indicator utama dan indicator maka dapat menimbulkan arti yang tidak memiliki hubungan yang selaras.
 - (f) tersedia pedoman atau petunjuk penyusunan LAKIP.

- (g) Tersedianya pedoman penyusunan LAKIP dari ORTAL.
 - (h) Tersedianya dokumen perencanaan indikator kinerja dan pedoman laporan tahunan berdasarkan capaian hasil realisasi.
 - (i) Fungsi penyusunan LAKIP OPD sudah jelas.
 - (j) Digunakan teori kelembagaan koersif yang masih diterapkan pada penyusunan LAKIP.
2. Hasil evaluasi indikator kinerja dalam LAKIP berdasarkan OPM dan M/cetak biru kinerja dengan analisis empat kuadran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja pada lampiran dokumen LAKIP Pemerintah Kota Jayapura tahun 2017 yang menurun berupa kuantitas upaya sebesar 8% dan dapat diikuti oleh kualitas upaya dengan hasil analisis 31%. Indikator kinerja yang menggambarkan kuantitas efek sudah menunjukkan pengaruh sebesar 29% dan kualitas efek sebesar 32%, sehingga indikator kinerja hasil Pemerintah Kota Jayapura bisa dikatakan telah mengukur manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifundin dan Saebani, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia Bandung.
- Akbar, Rusdi, Robyn Picher and Brian Perrin. 2012. "Performance Measurement In Indonesia The Case Of Local Government". *Pacific Accounting Review*
- _____, Robyn Picher and Brian Perrin. 2015. "Implementing Performance Measurement Systems Indonesia Local Government Under Pressure". *Pacific Accounting Review*
- Burako, Iester, 2020. Rekapitulasi "Nilai AKIP" Provinsi/Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Periode 2015-2018 Peningkatan Kinerja Organisasi- Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Setda Provinsi Papua(Tidak Dipublikasikan)
- Braun, Virginia and Victoria Clarke, 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology".
- Djojosoekarto, Agung. JRG. Djopari. Sutriyono. Daniel Lantang. Indra Jaya Piliang. Agustinus Fatem. Naffi Sanggenafa. 2008. *Kinerja Otonomi Khusus Papua*. Kemitraan Jakarta.
- Elfrida. 2014. "Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi)." 2014 *Tesis*. Maksi UGM Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan)
- Fauziah, Devi Zulfi. "Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Berbasis *Logic Model* (Studi Pada Pemerintah Kota Tangerang)." 2014 *Tesis*. Maksi UGM Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan)
- Fiedman, Mar. 2005. "Trying Hard Is Not Good Enough: How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities." FPSI Publishing.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STI YKPN Yogyakarta. Edisi Revisi Seri bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.
- Harun, Harun dan Kamase, P. Haryono. 2012. "Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia" in *Australian Accounting Business and Finance Journal*, Vol 6 (2)
- Hasil Evaluasi LAKIP Pemda Tahun 2012 dokumen-2/akuntabilitas-Kinerja/hasil- evaluasi- akip/file/3699- hasil-evaluasi- akip- kab- kota- <http://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-tahun-2012>. diakses tanggal 30 Januari 2015
- Hosio, Y Flora, 2015: "Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja (Studi Pada Kota Jayapura) ", *Tesis S2*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan)
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- Kementerian Negara Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2012 *Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2012*.

- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangsnn dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuanagan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998
- Knowlton, Lisa. Wyatt dan Cynthia C. Philips. 2013 “ The Logic Model Guidebook Better Strategies for Great Results” Edisi 2. SAGE Publication: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC
- Longo, Paul. J. 2002. “ The Performance Blueprint: An Integrated Logic Model Develop To Enhance Performnace Measurement Literacy: The Case of Performnace-Based Contract Management.” EDRS Price .
- _____. 2002. “Setting Outcomes, Measuring Results”. A Workshop on Performance Measurement Burr Oak State Park Resort Glouster, Ohio. Diakses pada tanggal 11 Februari 2015.
- Mahmudi. 2014. “Implementasi Akuntabilitas Akrual di Pemerintah Daerah.” Seminar tanggal 12-12-2014.
- Mardiasmo. 2002. “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.” Andi Yogyakarta
- _____. 2009. “Akuntabilitas Sektor Publik.” Andi. Yogyakarta.
- Marvin, Henry. 2012: “Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bantul “, *Tesis S2*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan)
- Mahsun, Mohamad. 2014. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik.” Edisi Pertama. BPFE- Yogyakarta
- McLaughlin, Jhon. A and Gretchen B. Jordan. 1999. “Logic Models: A Tool For Telling Your Program’s Performance Story”. Final Draft of paper in *Evaluation and Program Planning*. Diakses pada tanggal 11 Februari 2015.
- Panduan Pedoman Umum Penulisan Tesis Maksi FEB UGM 2014.
- Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Akrual
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 dan 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
- Rahmadoni, Firman. 2013. *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Hasil* (Studi Pada Pemerintah Kota Pangkal Pinang)
- Ramandei, Pilipus. 2009. “Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Manajemen Aparat Pemerintah Daerah”
- Sekaran,Umar. 2006. *Research Methods For Business*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuanntitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah
- UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 21/2002 tentang Otonomi Khusus Papua

UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah